

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

ISSN : 2443-1214

Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU) Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
(Agus Purnomo)

Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Belanja Batik Khas Lampung Di Kota Bandar Lampung
(Dora Rinova)

Pengaruh Penyuluhan Pembangunan Dan Pengetahuan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) Pada Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang
(Gladytha Gunawan)

Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung
(Kukuh Julian)

Kualitas Pengawasan Pimpinan Dalam Pembinaan Disiplin Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
(Malik)

Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Balai Latihan Kerja (BLK) Metro
(Neysa Amallia, Erwin Putu Basai)

Evaluasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Perkebunan Nusantara VII (PERSERO) Di Provinsi Lampung
(Veronika Saptarini)



e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 4 No. 1 Agustus 2018

Pembina

Dr.Ir. M. Yusuf S.Barusman, MBA

Penanggung Jawab

Dr.Yadi Lustiadi,M.Si

Ketua Penyunting

Dr. Malik,M.Si

Penyunting Ahli

Prof.Dr. Yulianto,M.Si(FISIP-UNILA)

Dr.Akhmad Suharyo,M.Si (FISIP-UBL)

Dr.Nur Efendi,M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Jamal,M.Si (FISIP-UHO)

Penyunting Pelaksana

Refly Setiawan, S.A.P., M.Si

Desi Wahyuni, S.A.P

Tata Usaha

Winda, SE

Penerbit

Universitas Bandar Lampung

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Alamat Redaksi

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu- Bandar Lampung 35142

Telp:(0721) 789825, Fax:(0721) 770261,E-mail: Pascasarjana@ubl.ac.id

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 4 No. 1 Agustus 2018

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMPEDU) Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung | 1-22 |
| Agus Purnomo | |
| Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Belanja Batik Khas Lampung Di Kota Bandar Lampung | 23-38 |
| Dora Rinova | |
| Pengaruh Penyuluhan Pembangunan Dan Pengetahuan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (GERBANG DESA SABURAI) Pada Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat | 39-46 |
| Gladytha Gunawan | |
| Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung | 47-53 |
| Kukuh Julian | |
| Kualitas Pengawasan Pimpinan Dalam Pembinaan Disiplin Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung | 54-63 |
| Malik | |
| Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Balai Latihan Kerja (BLK) Metro | 64-75 |
| Neysa Amallia, Erwin Putubasai | |
| Evaluasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Perkebunan Nusantara VII (PERSERO) Di Provinsi Lampung | 76-87 |
| Veronika Saptarini | |

**KUALITAS PENGAWASAN PIMPINAN DALAM PEMBINAAN DISIPLIN
ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh :

**DR. MALIK, M.SI, DOSEN PRODI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FISIPOL UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ABSTRACT

Leadership Quality Supervision in the Discipline Development of Members of the Lampung Provincial Civil Service Police Unit. The problems in this study are: (1) How is the quality of leadership supervision in the Civil Service Police Unit in Lampung Province. (2) How to guide member discipline in the Civil Service Police Unit in Lampung Province.

The research method used qualitatively with descriptive analysis method, the use of this method is to describe and study qualitatively, supervising the leadership in fostering discipline of members of the Civil Service Police Unit of Lampung Province, reviewing qualitatively, how all data is obtained directly from informants in the field by using interviews and Study documents.

Quality Supervision of leaders in the Civil Service Police Unit in Lampung Province, in general has shown compliance with Governor Regulation No. 6 of 2016 concerning the main duties and functions of the Lampung Provincial Civil Service Police Unit, then the leadership in carrying out direct supervision, namely by directly monitoring the activities being carried out by employees, while indirect supervision by the leadership is by monitoring employees through monthly reports and absent from routine employee activities carrier out.

The implementation of discipline in the Civil Service Police Unit in Lampung Province, especially the adherence to time has been relatively good, but there are still those who often take advantage of the time to carry out personal tasks if given an external assignment, then there are still frequent tasks given by the leadership, so employees sometimes unable to set the time to complete the work being carried out as a mandatory task.

Keywords: Quality, Supervision, Discipline

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah,

untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk

dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang (UU No. 23 tahun 2014). Penyempurnaan tersebut, pada dasarnya merupakan perubahan paradigma manajemen pemerintahan daerah yang bermuara pada perumusan kembali tujuan manajemen pemerintah, yakni melayani kepentingan publik sebagai wujud pelaksanaan undang-undang otonomi Daerah.

Dalam kegiatan suatu organisasi pemerintah harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, seiring dengan harapan terciptanya suatu pemerintahan yang baik (*good governance*). Adanya beberapa aspek penting yang harus diperhatikan pimpinan organisasi dalam melakukan pengawasannya antara lain ; memperhatikan aktivitas-aktivitas yang dibangun dalam kinerja organisasi, memperhatikan tindakan-tindakan yang dijalankan sesuai dengan struktur dan susunan organisasi yang berlaku, serta ada upaya bersama dalam meraih keberhasilan laporan yang dicapainya. Dengan demikian unsur-unsur manajemen pemerintahan harus dikuasai secara konseptual dan mampu dilaksanakan. Dengan demikian pengawasan sebagai bagian dari rangkaian manajemen tidak dapat dihindari. Seperti yang dinyatakan oleh Nawawi (2002 : 91) bahwa “pengawasan secara bersamaan diarahkan bagi terselenggaranya tugas dan pekerjaan organisasi secara keseluruhan” Pengawasan terkait pada kemampuan pimpinan

dalam organisasi.

Dengan demikian bahwa permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang pemikiran, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah :

1. Bagaimana Kualitas Pengawasan Pimpinan dalam membina disiplin pada satuan polisi pamong praja di Provinsi Lampung.
2. Aspek-aspek apa yang menghambat kualitas pengawasan pimpinan dalam pembinaan Disiplin pada Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Lampung.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak terutama bagi peneliti maupun pihak terkait secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam upaya mengembangkan pengetahuan tentang konsep-konsep dan teori-teori administrasi Negara pada umumnya, terutama yang menyangkut kualitas pengawasan pimpinan dalam pembinaan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Lampung.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama berkaitan dengan kualitas pengawasan pimpinan anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Lampung.

II. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pengawasan

Dalam pelaksanaan salah

satu fungsi pimpinan dalam menjamin penerapan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka pengawasan dianggap sangat memegang peranan yang sangat penting untuk mengefektifkan kegiatan pegawai. Pimpinan organisasi berusaha mengadakan tindakan perbaikan terhadap kesalahan yang dilakukan para bawahannya di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan organisasi. Tindakan perbaikan oleh pimpinan organisasi lebih dipokuskan pada aspek yang salah serta cara pengaturan tindakan yang diberikan kepada unit kerja yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan organisasi. Perbaikan yang diberikan kepada pegawai itu difokuskan pada aspek nilai kerjanya, cara kerjanya, serta kinerja unit kerja yang dilakukan secara rutin dalam suatu organisasi, sehingga apa yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan kenyataan

Keberhasilan pimpinan organisasi meaksanakan pengawasan sangat ditentukan tehnik-tehnik yang digunakannya, sehingga akan mendukung terhadap kedisiplinan pegawai dalam bekerja sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pegawai tersebut. Efektivitas pengawasan intern yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pendapat Siagian (2007 :205) menyebutkan tehnik-tehnik pengawasan meliputi :

1. Tehnik pengawasan langsung (*direct control*). Yang dimaksud dengan

pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi dan atau para manajer mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Bentuk pengawasan langsung dalam organisasi meliputi ;

- a. inspeksi langsung
 - b. Pengamatan Kelapangan
 - c. pelaporan di tempat kerja
2. Tehnik pengawasan tidak langsung dalam organisasi yakni pengawasan dari jarak jauh, mencakup :
 - a. Laporan yang disampaikan oleh bawahan tertulis.
 - b. Laporan yang disampaikan oleh bawahan lisan

Tehnik pengawasan langsung maupun tehnik pengawasan tidak langsung merupakan dua bentuk pengawasan yang dijalankan pimpinan dalam organisasi. Pimpinan organisasi dalam menjalankan tehnik-tehnik pengawasan harus cermat dan cepat sehingga mendukung kelancaran penerapan tugas dan pekerjaan organisasi.

2. Konsep Disiplin

Sikap disiplin erat kaitannya dengan sikap mental dan kesadaran diri untuk mematuhi segenap norma, keputusan dan aturan yang berlaku dalam lingkungannya dimana seseorang berada. Dalam hal ini The Liang Gie (2005:56) menyatakan

bahwa : Disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi tunduk kepada peraturan-peraturan yang ada dengan rasa senang hati.

Esensi pengertian disiplin yang dikemukakan di atas adalah bahwa tujuan pelaksanaan disiplin pada dasarnya diarahkan bagi terciptanya efisiensi (daya guna) dan efektivitas (hasil guna), dimana keadaan ini dapat dicapai melalui sistem pengaturan yang tepat dalam arti didasarkan atas suatu kebutuhan dan rencana yang jelas.

Setiap Bentuk Organisasi tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan disiplin menurut Nitisemito (2006:199) menyatakan masalah kedisiplinan kerja, merupakan masalah yang perlu diperhatikan, sebab dengan adanya kedisiplinan, dapat mempengaruhi (1) efektivitas dan efisiensi tujuan organisasi (2) ketaatan sikap dan tingkah laku pegawai yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

III. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang, masalah dan tujuan penelitian ini maka menurut peneliti yang sesuai dengan desain penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini adalah untuk mendeskripsikan kualitas Pengawasan Pimpinan Dalam Pembinaan Disiplin Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, mengkaji secara kualitatif, bagaimana

Seluruh data diperoleh langsung dari informan dilapangan dengan menggunakan wawancara dan Studi dokumen.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.

IV. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengawasan Langsung

Peningkatan efisiensi aparatur negara diupayakan melalui pendayagunaan administrasi umum dan kearsipan yang meliputi aspek administrasi perkantoran, keuangan dan materiil, persuratan dan dokumentasi kearsipan agar lebih mampu menunjang peningkatan kelancaran dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan dilingkungan instansi pemerintah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut maka dibutuhkan suatu kerja keras oleh pimpinan dalam melakukan pengawasan.

Pelaksanaan peran dan tugas pengawasan di instansi pemerintah sebenarnya dapat diposisikan dalam upaya penjaminan mutu (*quality assurance*) yang diimbangi dengan peningkatan mutu (*quality enhancement*).

Penjaminan mutu berkaitan dengan inisiatif superstruktur pada suatu instansi dan pendekatannya bersifat *top down*, sementara peningkatan mutu berkaitan dengan pemberdayaan anggota organisasi untuk dapat berinisiatif dalam meningkatkan mutu pekerjaan baik menyangkut peningkatan kompetensi individu, maupun kapabilitas melalui inisiatif sendiri sehingga pendekatannya bersifat *bottom up*.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Provinsi Lampung mengemukakan bahwa : Dalam pelaksanaan pengawasan langsung terhadap aparatur, setiap harinya saya sudah melaksanakannya, utamanya saat apel pagi, sudah berjalan sebagaimana tugas, fungsi dan wewenang masing-masing pegawai tersebut, namun demikian masih ada pegawai yang kurang melaksanakan tugasnya, misalnya tentang perkembangan pekerjaan, aparatur ada yang belum sepenuhnya melaporkan kepada pimpinan secara periodik, sehingga pimpinan sering menanyakan laporan tersebut. (Hasil wawancara 2018).

Sesuai hasil penelitian, bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap aparatur Satpol PP Provinsi Lampung, sudah dilaksanakan namun belum optimal karena masih ada pegawai yang belum melaksanakan pekerjaannya dengan baik terhadap, kemudian masih ada juga pegawai yang belum sepenuhnya selalu melaporkan kegiatannya dengan

pimpinan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada pegawai tersebut

Sesuai hasil wawancara dengan Anggota Satpol PP Provinsi Lampung mengemukakan bahwa :

Kami selalu diawasi oleh pimpinan dalam melaksanakan tugas setiap pagi, utamanya pada saat apel pagi kami selalu diabsen, kemudian dalam pelaksanaan tugas juga kami harus melaporkan tugas-tugas yang kami laksanakan, namun terkadang karena banyaknya pekerjaan yang dibenkan kepada kami sehingga sering terlambat kami laporkan kegiatan yang kami laksanakan kepada pimpinan, (wawancara 2018).

Dengan demikian bahwa pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu pekerjaan ini, sering disebut sebagai supervise pekerjaan. Meski berbeda-beda namanya, namun semua istilah tersebut fokus dan tujuannya sama, yaitu untuk mengkaji, menilai, memperbaiki, dan mengembangkan mutu kegiatan yang dilaksanakan pegawai, baik perorangan atau kelompok melalui pendekatan dan konsultasi dalam nuansa dialog profesional. Pengawasan menyangkut tindakan yang dilakukan seorang pimpinan untuk menjamin apa yang dilaksanakan atau hasil yang dicapainya itu dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sesuai hasil penelitian bahwa pengawasan langsung pada satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, diketahui bahwa pimpinan melakukan pengawasan langsung setiap harinya terhadap bawahannya sebagai wujud kepeduliannya terhadap pelaksanaan kualitas pengawasan pimpinan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Aktivitas hasil kerja pegawai yang dinilai oleh pimpinan sangatlah luas dan kompleks, karena akan berkaitan dengan kemampuan individu pegawai dalam melaksanakan tugas, kemampuan unit kerja dalam menyusun laporan hasil kerjanya, kemampuan pimpinan maupun staf pimpinan dalam menilai hasil kerja staf secara keseluruhan. Hasil kerja yang dinilai oleh pimpinan tidak cukup, tanpa didukung oleh aspek-aspek kejujuran, kedisiplinan, tanggungjawab dan ketaatan dalam melaksanakan tugasnya sehingga akan mendukung keberhasilan melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Sesuai hasil wawancara dengan Sekretaris Satpol PP Provinsi Lampung mengemukakan bahwa:

Dalam pelaksanaan pengawasan saya tidak mesti mengikuti staf terhadap pelaksanaan pekerjaannya, namun kami bias mengawasi pekerjaannya melalui laporan hasil kerjanya, itu

akan tergambar apakah pekerjaan yang dilaksanakan betul atau tidak, (Hasil Wasancara 2018).

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dalam suatu organisasi, diharapkan dapat mengemukakan kesalahan dan tindakan yang akan diberikan kepada unit kerja maupun individu pegawainya, hal ini dimaksudkan untuk untuk melihat dan mengatur seberapa jauh kemampuan mengendalikan individu masing-masing dalam bekerjanya. Hasil yang dicapai unit kerja maupun individu pegawai harus sesuai dengan rencana yang telah dijadwalkan sebelumnya sehingga secara keseluruhan akan berhasil dicapai secara efektif dan efisien.

Dengan demikian bahwa pengawasan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk manajemen agar supaya setiap pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, tidak harus dilakukan secara langsung, namun dengan laporan perkembangan pekerjaan yang dilakukan pimpinan dapat mengetahui apakah pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar terjadi atau hanya direkayasa, untuk itu pimpinan juga harus jeli melihat dan mempelajari dari laporan yang diberikan oleh bawahan atas apa yang telah dilaksanakannya.

Sesuai hasil wawancara dengan Anggota Satpol PP

Provinsi Lampung mengemukakan bahwa :

Kami setiap bulannya harus melaporkan kegiatan yang kami laksanakan, karena keterbatasan kemampuan mengingat kegiatan yang kami kerjakan setiap hari, sehingga kegiatan harus dicatat setiap harinya agar kami tidak kesulitan dalam melaporkan kegiatan yang dilaksanakan, ketika membuat laporan bulanan, karena pimpinan bisa mengetahui apabila laporan yang kami tulis tidak dilaksanakan, (wawancara Desember 2017).

Dalam pelaksanaan kualitas pengawasan pimpinan terhadap para bawahannya disesuaikan dengan kepentingan serta usaha yang baik dalam mendukung keberhasilan organisasi, salah satunya adalah dengan cara memaksa bawahan menunjukkan untuk melaksanakan kegiatannya sesuai tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga dapat mengurangi penyimpangan serta dapat mengatur tindakan bawahan dalam menyampaikan laporannya secara keseluruhan.

Sesuai hasil penelitian tersebut bahwa pelaksanaan pengawasan tidak langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Provinsi Lampung, telah dilaksanakan sebab dengan menerima laporan dari staf berarti pimpinan sudah melaksanakan tugas tersebut, dengan demikian akan nampak apakah pekerjaan yang diporkan tersebut pernah dilaksanakan atau tidak, pekerjaan selesai tepat waktu atau tidak, karena

akan nampak pada laporan tersebut, sebab setiap pegawai sudah ada tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pengawasan intern pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Provinsi Lampung dilihat dari sudut orientasinya yang berjalan sekarang ini lebih menekankan pada mutu dalam, fakta, dimana peralatan yang sering dipergunakan adalah berbagai aturan dan standar yang harus dipenuhi melalui kegiatan monitoring (pemantauan), memberi judgment akan kondisi kelembagaan melalui kegiatan evaluasi, dan melaporkan serta menindaklanjutinya dalam bentuk kegiatan perbaikan melalui upaya-upaya pemberdayaan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Provinsi Lampung. Hal ini sebagai pelaksanaan peran pengawas sebagai mitra, inovator, konselor, motivator dan konsultan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Provinsi Lampung.

Dengan demikian bahwa pengawasan adalah kegiatan manajerial yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki, walaupun pelaksanaannya ada yang belum terlaksana dengan optimal, karena masih ada pegawai yang mempunyai tugas ganda, dan sering ada perubahan mendadak terhadap tugas-tugas yang ada walaupun sifatnya temporer. Misalnya Pegawai tiba-tiba ditempatkan bagian jalan untuk membantu mengurai

kemacetan, atau tiba-tiba pimpinan keluar kota dan pimpinan minta pengawalan oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP), sehingga harus meninggalkan tugas pokok mereka karena pimpinan menginstruksikan untuk mengikuti perjalannya keluar kota.

Dengan demikian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tata kerja dan standar proseduroperasional pelaksanaan tugas belum ditaatisepenuhnya oleh seluruh pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung. Realitas di lapangan mengenai ketidaktaatan pada ketentuan tata kerja dan standar proseduroperasional pelaksanaan tugas.

Sesuai hasil penelitian bahwa, pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung, masih ada yang belum mentaati ketentuan tata kerja dan standar prosedur operasional dalam pelaksanaan tugas. Hal tersebut nampak dari tidak berjalannya hirarki dalam pemberian perintah tugas serta sistem pelaksanaan kerja yang tidak mengikuti urutan sub-tugas dan juga rencana yang menggambarkan urutan dan kondisi (syarat) pelaksanaan tugas.

3. Efektivitas dan Efisiensi Tujuan Organisasi.

Disiplin dipandang sebagai suatu keadaan yang menunjukkan pengetahuan tentang sistem peraturan dan sikap taat terhadap peraturan tersebut yang berlandaskan

keihlasan atau kesadaran diri. Disiplin yang sesungguhnya adalah ketika seseorang pegawai mengetahui kehadiran, dan dengan kesadaran dirinya ia mentaati sepeuhnya kehadiran perilaku, sistem norma, kriteria, dan standar-standar organisasi tersebut.

Sesuai hasil penelitian bahwa efektivitas dan efisiensi tujuan organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung, belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan dan pegawai juga masih ada yang belum mengetahui persis secara akurat ketentuan mengenai tata kerja dalam melaksanakan tugas kedinasan. Tata kerja yang dimaksudkan mencakup alur perintah dari atasan, alur pengaduan keluhan dan permintaan dari bawahan, alur pelaporan, dari mana input kerja diperoleh dan kemana output kerja disampaikan, serta pihak-pihak yang harus berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Pegawai yang mempunyai disiplin dan motivasi kerja yang kuat cenderung mencari alternatif solusi atas suatu masalah lebih daripada hanya mengemukakan masalah, memberikan kontribusi dalam kegiatan kelompok, berupaya mencari informasi baru dan mengembangkan kompetensi diri, tidak bersikap pasif dan menunggu perintah, tidak menghindari atau menolak tugas dengan alasan yang dicari-cari, tidak menunda-nunda pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang tidak produktif.

Menurut penulis bahwa pelaksanaan disiplin pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung, telah dilaksanakan namun belum optimal, hal tersebut terjadi karena masih adanya pegawai yang sering melaksanakan tugas pribadi pada jam kantor, sehingga pegawai masih ada yang hanya ikut apel dan absen tetapi sesudahnya pegawai tersebut melaksanakan tugas pribadi pada jam kantor berjalan.

4. Ketaatan Sikap dan Tingkah Laku

Ketaatan tentang sikap dan tingkah laku, pada bagian ini mencakup wujud perilaku sebagai cerminan dari pengetahuan tentang kehadiran. Pegawai tidak saja diharapkan untuk mengetahui kehadiran tetapi juga mememanifestasikannya dalam perilaku aktual sehari-hari di tempat kerja. Ketaatan yang dimaksudkan adalah ketaatan pegawai terhadap ketentuan jam kerja, aturan berpakaian, aturan tata kerja, dan prosedur operasional yang berlaku dalam unit kerjanya.

Hal ini berarti bahwa ketentuan jam kerja oleh telah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung, namun belum sepenuhnya ditaati oleh pegawai negeri sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung. Namun sebagian pegawai yang berada pada kategori kurang mentaati mentaati. Kurang mentaati disini berarti datang dan pulang tidak sesuai ketentuan waktu yang

ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut.

Dengan demikian menunjukkan bahwa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung, pada umumnya sudah mentaati ketentuan pakaian dinas yang nampak dari pakaian yang dikenakan ke kantor atau dalam kegiatan kedinasan. Namun, kadangkala ada pegawai yang tidak mengenakan pakaian kantor secara konsisten, misalnya pakaian dinas lapangan dan pakaian dinas harian. Hal ini tidak dianggap oleh pimpinan sebagai pelanggaran sehingga pegawai staf tetap melakukannya secara berulang-ulang

Sesuai hasil penelitian tentang pengawasan intern dalam pembinaan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, dengan menggunakan teori Achmad (2007 : 205) menyebutkan tehnik-tehnik pengawasan meliputi, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, dan disiplin dengan menggunakan konsep Nitisemito (2006:199) yaitu (1) efektivitas dan efisiensi tujuan organisasi (2) ketaatan sikap dan tingkah laku pegawai yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dapat mendukung daripada penelitian ini.

V. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kualitas pengawasan pimpinan pada Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Lampung, secara umum telah menunjukkan adanya kepatuhan terhadap Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, kemudian pimpinan dalam melaksanakan pengawasan langsung yaitu dengan turun langsung memonitori kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh pegawai, sedangkan pengawasan tidak langsung yang dilakukan pimpinan yaitu dengan memonitoring pegawai melalui laporan bulanan dan absen terhadap kegiatan rutin pegawai yang dilaksanakan.
 2. Penerapan disiplin pada Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Lampung, utamanya ketaatan terhadap waktu sudah relatif baik, namun masih ada yang sering memanfaatkan antara waktu untuk melaksanakan tugas pribadi apabila diberikan tugas luar, kemudian masih sering terjadi tugas yang diberikan oleh pimpinan sifatnya dadakan, sehingga pegawai terkadang tidak dapat mengatur waktu untuk menyelesaikan pekerjaan wajib yang sedang dilaksanakan.
- sehingga efektivitas kerja pegawai dapat terwujud, sebagaimana tujuan organisasi.
2. Penerapan disiplin pada Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Lampung, dinilai belum optimal sehingga perlu ada peningkatan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi petugas yang melaksanakan pengawasan, agar optimal dalam pelaksanaan tugas tersebut.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Moenir, 2003. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta, Gunung Agung.
- Nawawi, Endari. 2002. *Ilmu Administrasi*, Jakarta Ghalia Indonesia
- Nitisemito, 2006, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta, Yayasan Penerbit Adm
- Siagian, S.P., 2007, *Filsafat administrasi*. Jakarta: Haji Masagung.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- The Liang Gie, 2005, *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta. Nur Cahaya.
- Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

ISSN : 2443-1214

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 4 No. 1 Agustus 2018

Diterbitkan Oleh :
Program Pascasarjana
Magister Ilmu Administrasi
Universitas Bandar Lampung

